



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 11/ORT.07/3302/2022

TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORI.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal Rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.4-Kpt/05/ KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORI.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal Rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
2. Berita Acara Nomor 103/ORT.07/3302/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 15 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

Sigit Budiyanto



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
 Nomor : 11/ORT.07/3302/2022
 Tanggal : 15 Februari 2022
 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANYUMAS TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim RB di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	√					√							
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan RB secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan <i>kick off</i> / pembangunan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas						√							
			3. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU kabupaten Banyumas.						√							
	2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media.	1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal; dan								√	√	√	√	√	√	
			2. Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Banyumas di <i>website</i> resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.								√	√	√	√	√	√	
		2. Sosialisasi nilai - nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun; dan									√					
			2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN.									√	√	√	√	√	
		3. Penyelenggaraan integritas lingkungan kerja : 1) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai;	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik jajaran anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Banyumas;	√													
			1. Presentase (%) pelaporan LHKPN;				√										
			2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN;	2. Presentase (%) pelaporan LHKASN;			√										

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan;	4. Dokumen laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi:			√										
			4) Pembangunan Zona Integritas	a). Surat Potensi Benturan Kepentingan;			√										
				b) Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan;			√										
				c). Deklarasi pencangangan zona integritas KPU Kabupaten Banyumas.			√										
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.			√										
				2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian.			√										
			5. Pembangunan instrumen <i>reward and punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	1. Tersedianya instrumen <i>reward and punishment</i> di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas; dan								√					
				2. Pembangunan survei kepuasan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.											√		
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan.						√						√	
			2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB dan Rencana Aksi agen perubahan di lingkungan kerja melalui lembar Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas).	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja; dan						√						√	
				2. Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit.												√	
			3. Melakukan pelaporan rencana aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada : 1) tim pengarah 2) tim reformasi Birokrasi KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.	1. TIM RB KPU Provinsi menerima pelaporan : a) SK TIM RB, Tim Agen Perubahan dan Assessor; b). Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan unit kerja/satuan kerja c). Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit);		√											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2. Tersedia dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta Pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya.		√											
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Evaluasi secara berkala perundang-undangan (Naskah Dinas Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	Adanya data perundang undangan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.			√										
		2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangundangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di IKPU Kabupaten Banyumas.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah direvisi.			√										
		3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangundangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah direvisi.			√										
		4. Merumuskan berbagai peraturan perundangundangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah disahkan.			√										
		5. Pengelolaan JDIH.	1. Pembangunan JDIH KPU Kabupaten Bayumas	1. Dapat diaksesnya JDIH KPU Kabupaten Banyumas; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Banyumas	2. Termutakhirnya data JDIH KPU Kabupaten Banyumas.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Penguatan Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi	1. FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi; dan			√										
			2. Pengisian Kuesioner evaluasi organisasi.	2. Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.												√	
		2. Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK KPU Kabupaten Banyumas sesuai mandat.	1. SOTK KPU Kabupaten Banyumas sesuai mandat.			√										
			2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi KPU Kabupaten Banyumas.	2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Banyumas			√										
4	Penguatan Tata Laksana	1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;			√										
				2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;			√										
				3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan			√										
				4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja; dan			√										
			2. Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi.			√										
			3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas; dan	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP;			√										
				2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;			√										
				3. SOP sudah dilegalkan; dan			√										
				4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.			√										
			4. Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti.			√										

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan Unit/Satuan Kerja: 1. Penyampaian Kebijakan/ Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan satuan kerja; 2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja; 3. Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan satuan kerja; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID; dan 5. Survei kepuasan pemohon informasi.	1. Adanya kebijakan pendukung PID; 2. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder; 3. Meningkatnya kepuasan layanan PID; 4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti; 5. Jumlah sengketa informasi; 6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan 7. Indeks kepuasan permohonan informasi.		√											
		3. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	1. Tata Kelola SPBE di lingkungan unit/satuan kerja: a) Pembangunan aplikasi inovatif/transformasi Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di unit/satuan kerja lain; b) Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK; c) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi; d) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, ebudgeting).	1. Kebijakan internal tata kelola SPBE; 2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP); 3. Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP; 4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan unit/satuan kerja; 5. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan unit/satuan kerja; dan 6. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan.			√										
			2. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan: a) Aplikasi tata naskah dinas b) Aplikasi Manajemen Kepegawaian c) Aplikasi Perencanaan d) Aplikasi penganggaran e) Aplikasi Keuangan f) Aplikasi Manajemen Kinerja g) Aplikasi Pengadaan	1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan; 2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian; 3. Terisinya data aplikasi Manajemen Perencanaan; 4. Terisinya data aplikasi Penganggaran; 5. Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan; 6. Terisinya aplikasi manajemen kinerja; dan 7. % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan.			√										

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3. Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: a) Layanan pengaduan Publik; b) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum; c) Layanan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); d) Layanan Kepemiluan; dan e) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).	1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan; 2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui; 3. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan; 4. Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta: a) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik; b) Indeks Survei Kepuasan Publik; terhadap aplikasi. 5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.			√										
					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							√										
							√										
		4. Penerapan sistem kearsipan yang handal.	1) Penerapan sistem arsip 2) Kerjasama dengan arsip daerah 3) Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan unit/satuan kerja	1. Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan digital di lingkungan unit/satuan kerja; 2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan unit/satuan kerja; 3. Terdokumentasinya arsip vital; dan 4. Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis.					√								
									√								
									√								
			Perencanaan Pengembangan E-goverment di lingkungan KPU Banyumas baik untuk proses birokrasi maupun untuk pelayanan masyarakat.	Telah memiliki rencana pengembangan <i>e-goverment</i> .			√										
			Pengembangan <i>e-goverment</i> dalam rangka mendukung proses birokrasi di KPU Banyumas.	Untuk Tahun 2022 yaitu <i>e-goverment</i> yang dibuat yaitu sistem Basis Data SDM, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pilkada dan Sistem Tata Persuratan.			√										

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Pembangunan Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran kinerja Individu	1. Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai;		√											
				2. Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (target output/mutu/waktu/biaya);		√											
				3. Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ <i>cascading</i> ;		√											
				4. Pengukuran periodik Sasaran Kinerja individu;					√						√		
				5. Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP;					√						√		
				6. Penilaian kinerja indiiidu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> .											√		
			2. Penerapan assesment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai;	1. Data mutasi;			√										
				2. Data Promosi;			√										
				3. Data peserta assesment.			√										
			3. Penerapan disiplin dan kode etik penyelenggara Pemilu;	1. Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya;			√										
				2. Jumlah pelanggaran tahun ini;												√	
				3. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman.												√	
			4. Perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun non-ASN menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK);	Tersedianya dokumen Analisis beban kerja (ABK).				√									
				5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;	1. Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas; dan				√								
					2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi.											√	
				6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan; dan	Setiap jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan.					√							
			7. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Profesionalisme ASN	Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung kinerja KPU Kabupaten Banyumas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan dan penetapan Renstra KPU Kabupaten Banyumas	Dokumen Renstra KPU Kabupaten Banyumas	√												
			2. Review Renstra KPU Kabupaten Banyumas	Dokumen review Renstra KPU Kabupaten Banyumas			√										
			3. Penetapan kinerja dengan menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	1. Adanya dokumen penetapan kinerja hingga level eselon IV;		√											
				2. % Capaian Kinerja merupakan unsur pemberian <i>reward</i> and <i>punishment</i> ; dan							√						
				3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.			√										
			4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien;	1. Adanya program dan kegiatan :													
				a) Jumlah program;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b) jumlah kegiatan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				c) jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				d) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Persentase sasaran kinerja :	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				a) Jumlah Sasaran Kinerja;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Persentase anggaran yang berhasil direalisasi untuk mendukung tercapainya kinerja utama:	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				a) jumlah anggaran total; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b) jumlah anggaran yang berhasil direalisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.												√	
			6. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Banyumas;	% Capaian Kinerja KPU Kabupaten Banyumas.												√	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			7. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Banyumas; dan	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Banyumas; dan												√	
				2. Review LAKIP KPU Kabupaten Banyumas.												√	
			8. Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Banyumas.	Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Banyumas tepat waktu.												√	
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin	1. Terisnya aplikasi e-Lapkin; dan												√	
				2. Data e-Lapkin KPU Kabupaten Banyumas telah termutakhirkan.												√	
			2. Pelatihan SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja; dan	1. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan; dan												√	
				2. Pengelola PPBJ bersertifikat.													
			3. Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja:	1. % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN;												√	
			a) JF Analis Pengelola Keuangan APBN;	2. % Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa; dan												√	
			b) JF Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa; dan	3. % Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana.												√	
			c) JF Perencana.														
7	Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	1. Pencanangan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;	1. Terbentuknya Tim Zona Integritas;			√										
				2. Ditandatangani piagam integritas oleh para pihak dan saksi;			√										
			2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;	3. Masuknya KPU Kabupaten Banyumas dalam penilaian WBK/WBBM;				√									
				4. Adanya rencana kerja zona integritas yang sudah dilegalkan.				√									
			3. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas;	1. Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 area zona integritas di dalam rencana aksi zona integritas; dan				√									
				2. % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas.				√									

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	1. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas;			√										
				2. % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangan zona integritas; dan			√										
				3. Melaporkan pembangunan zona integritas dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan.			√										
			5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI).	1. Terisinya LKE Zona Integritas; dan												√	
				2. Terisinya PMPRB Zona Integritas bagi unit/satu kerja yang ditunjuk.			√										
		2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	1. Pembentukan Unit Pengedali Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas			√										
			2. Pembangunan komitmen dan diseminasi atas peraturan gratifikasi;	1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;			√										
				2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;			√										
				3. Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU kabupaten Banyumas.			√										
			3. <i>Public Campaign</i> Anti Gratifikasi.	Adanya alat anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal.										√			
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem Pengedalian Gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi;												√	
				2. Tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan.												√	
		3. Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> KPU	1. Pembangunan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	1. Tersedianya WBS yang mudah diakses publik;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Adanya SOP WBS; dan			√										
				3. Adanya pengelola WBS.			√										
			2. Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;	Persentase pengaduan WBS selesai sampai ditindaklanjuti.												√	
			3. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas												√	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KPU Kabupaten Banyumas	1. Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU kabupaten Banyumas.			√										
			2. Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan bagi anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;	% pendandatangan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;			√										
			3. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut atas pengelolaan benturan kepentingan.	Dokumen laporan monitoring evaluasi pengelolaan benturan kepentingan.													
		5. Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	Adanya tim SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	√												
			2. Pelaksanaan SPIP :	Terselenggara:		√											
			a). Lingkungan pengendalian	a) Lingkungan pengendalian;		√											
			b). Penilaian risiko;	b) Penilaian risiko;		√											
			c). Kegiatan pengendalian;	c) Kegiatan pengendalian;		√											
			d).Informasi dan komunikasi	d) Informasi dan komunikasi;dan		√											
			e). Pemantauan pengendalian intern.	e) Pemantauan pengendalian intern.		√											
			3. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan SPIP	Pelaporan Buku Kendali Tepat Waktu.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		6. Penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan;				√									
				2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan;				√									
				3. Terdapat mekanisme prosedur pengaduan;				√									
				4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;				√									
			2. Pengelolaan pengendalian masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;	Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti.						√							
			3. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat.						√						√	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		7. Peningkatan Integritas Individu	1. Penyampaian LHKPN.	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas			√										
			2. Penyampaian LHKASN.	100% seluruh wajib lapor LHKASN di lingkungan KPU kabupaten Banyumas.			√										
		8. Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa.	1. Pembangunan unit kerja pengadaan barang/jasa.	Adanya struktur pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;			√										
			2. Pengelolaan pengadaan barang/jasa.	Persentase pelaksanaan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			√										
			3. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas pengelolaan pengadaan barang/jasa	Laporan pengadaan barang/jasa.						√						√	
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;	Memetakan jenis-jenis/produk-produk pelayanan administrasi internal kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait kepemiluan) Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal maupun eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009, meliputi: a). Dasar hukum; b). Persyaratan layanan; c). Sistem, mekanisme dan prosedur layanan; d). Jangka waktu penyelesaian layanan; e). Biaya/tarif; f). Produk layanan; g). Saran, prasarana dan/atau fasilitas; h). Kompetensi pelaksana; i). Pengawasan internal; j). Penanganan pengaduan, saran dan masukan; k). Jumlah pelaksana; l). Jaminan pelayanan; m). Jaminan keamanan; n). Evaluasi kinerja pelaksana;	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas baik kepada internal dan eksternal:			√										
				1. Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (review dan perbaikan standar pelayanan);			√										
				2. Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;			√										
				3. Indeks kepuasan layanan yang didapat melalui survey pelayanan;												√	
				4. Jumlah sengketa pelayanan menurun												√	
				5. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik ASN dan kode etik penyelenggara Pemilu;												√	
				6. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai);												√	
				7. Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan atau eksternal.					√								

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2. Mendorong inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	1. Menciptakan/melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: a). Kesesuaian persyaratan; b). Kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur; c). Kecepatan waktu penyelesaian; d). Kejelasan biaya tarif gratis/berbayar; e.) Kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan f). Kompetensi pelaksana; g). Perilaku petugas; h). Kualitas sarana dan prasarana; i). Penanganan pengaduan, saran dan masukan.	a) indeks kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan												√		
				b). Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan;			√											
				c). Adanya SOP pelayanan;			√											
				d). Informasi kepada publik terkait biaya layanan;			√											
				e). Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas baik kepada internal maupun eksternal;			√											
				f). Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi.				√										
			2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan	1. Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi;				√										
				2. Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.				√										
			3. Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik kepada pelayanan ke unit kerja/satuan kerja	1. Adanya sosialisasi inovasi;				√										
				2. <i>Benchlearning</i> dari unit/satker lain yang terkait hasil inovasi.				√										
		3. Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	1. Membangun dan menerapkan variabel dan Indikator Zona Hijau pelayanan publik: a). Standar pelayanan; b). Prasyarat layanan c). Produk layanan; d). Jangka waktu penyelesaian; e). Biaya/tarif.	1. Tersedianya standar pelayanan sesuai amanat UU;				√										
				2. Maklumat pelayanan;	2. Tersedianya maklumat pelayanan;					√								
				3. Sistem informasi pelayanan publik;	3. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik;					√								

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4. Sarana prasarana dan fasilitas;	4. Tersedianya sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak;					√								
			5. Pelayanan khusus kepada: a). Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll) b). Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus;	5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan;					√								
			6. Pengelolaan pengaduan: a). Ketersediaan sarana pengaduan; b). Ketersediaan informasi prosedur dan alat cara penyampaian aduan; c). Ketersediaan pejabat/petugas pengelolaan aduan.	6. Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan;					√								
			Penilaian kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan;	7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya;			√									√	
			8. Visi, misi dan motto pelayanan: a). Ketersediaan visi dan misi pelayanan b). Ketersediaan motto pelayanan;	8. Tersedianya visi, misi dan motto pelayanan;			√										
			9. Atribut pelayanan: a). Kartu identitas petugas b). Kartu nama; c). Petunjuk arah ruang layanan.	9. Atribut layanan dapat terlihat publik; dan 10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.			√										
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1. Pembangunan kerja sama;								√						
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu.								√						
		5. Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pelayanan								√					



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

Sigit Budiyanto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF S.